



# **BAHAN LPPD TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**JL. PAHLAWAN No. 1 RAWANG PAINAN  
Telepon/Fax (0756) 21601**



**PAINAN, 24 JANUARI 2019**



## DATA CAPAIAN MAKRO TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

PD Pelaksana : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		KET
			2017	2018	
A	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
	Indikator :				
1.	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				
	a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara:				
	- Reguler	Obrik	244	199	
	- Khusus	Obrik	475	59	
	- Kasus	Obrik	7	18	
	b. Jumlah temuan yang terinventarisir:				
	- Reguler	Temuan	1.025	720	
	- Khusus	Temuan	847	74	
	- Kasus	Temuan	30	18	
	c. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti:				
	- Reguler	Temuan	549	576	
	- Khusus	Temuan	315	-	
	- Kasus	Temuan	30	18	
	d. Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah.	Kali	1	1	
	e. Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kali	1	1	
	f. Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD	Kali	2	2	
	g. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi SPIP	Kali	1	-	

1	2	3	4	5	6
2.	Terlaksananya pemeriksaan dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan				
	a. Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawas yang telah mengikuti pelatihan	Orang	20	32	
	b. Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri	Angkatan	50	50	

A. URUSAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang melakukan pengawasan maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah **Penunjang Urusan**.

B. INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	B	BB	BB	BB	A
3.	Level Maturitas SPIP	1,97	1,97	2	3	3	3	4

Painan, 24 Januari 2019

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



**Drs. YESPI NAWIARSIH**

Pembina Tk.I.

NIP. 19681017 198903 1 003

3). *Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, tpegecatan gedung dan pagar kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 (100,00%)

4). *Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas operasional*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional, 4 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, service, suku cadang, bahan bakar minyak dan pembayaran STNK dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.242.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp156.386.287,00 (82,20%)

**Urusan Pilihan**

**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Dianggarkan dana sebesar Rp2.603.523.158,00 dengan realisasi sebesar Rp2.471.581.456,00 atau (94,93% ) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala*

Menampung belanja operasional pemeriksaan berkala/reguler berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2018 dengan penerbitan LHP sebanyak 200 berkas, pagu anggaran sebesar Rp1.294.560.535,00 dengan realisasi sebesar Rp1.195.383.750,00 atau (92,34% ).

2). *Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah*

Menampung biaya operasional pemeriksaan kasus/ khusus, dengan penerbitan LHP 101 berkas, pagu anggaran sebesar Rp778.578.673,00 dengan realisasi Rp759.905.380,00 atau (97,60%).

3). *Inventarisasi Temuan Pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan pemeliharaan Aplikasi SIM-HP dengan pagu anggaran sebesar Rp20.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.239.176,00 atau (99,48%).

4). *Tindak lanjut hasil temuan pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan objek pemeriksaan, pagu anggaran sebesar Rp358.912.950,00 dengan realisasi sebesar Rp357.728.600,00 atau (99,67%).

**I: OPD Pelaksana: INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Urusan yang dilaksanakan:**

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

**URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

A. Program dan Kegiatan (Jumlah Program sebanyak 4 Program dan Kegiatan sebanyak 25 Kegiatan)

Rincian Program dan kegiatan :

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13	
	<b>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.</b>	<b>171.350.000</b>	<b>3.388.632.683</b>	<b>59.350.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.631.332.633</b>	<b>170.500.000</b>	<b>3.183.865.517</b>	<b>59.350.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.425.715.517</b>	<b>94,34</b>
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>143.200.000</b>	<b>406.816.278</b>	<b>19.350.000</b>	<b>-</b>	<b>569.366.278</b>	<b>142.350.000</b>	<b>391.670.443</b>	<b>19.350.000</b>	<b>-</b>	<b>553.370.443</b>	<b>97,19</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	-	42.900.000	-	-	42.900.000	-	35.002.648	-	-	35.002.648	81,59
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.200.000	-	-	-	91.200.000	90.350.000	-	-	-	90.350.000	99,07
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	52.000.000	5.205.391	-	-	57.205.391	52.000.000	5.205.000	-	-	57.205.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	19.350.000	-	19.350.000	-	-	19.350.000	-	19.350.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	31.655.923	-	-	31.655.923	-	31.655.900	-	-	31.655.900	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	40.041.964	-	-	40.041.954	-	40.041.900	-	-	40.041.900	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	9.738.000	-	-	9.738.000	-	9.735.000	-	-	9.735.000	99,97

1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	-	4.500.000	-	-	4.500.000	-	4.320.000	-	-	4.320.000	96,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	42.290.000	-	-	42.290.000	-	39.592.500	-	-	39.592.500	93,62
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	-	161.350.000	-	-	161.350.000	-	161.212.495	-	-	161.212.495	99,91
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	47.425.000	-	-	47.425.000	-	47.295.000	-	-	47.295.000	99,73
12	Kegiatan Penyebarluasan Informas. Pembangunan	-	21.710.000	-	-	21.710.000	-	17.610.000	-	-	17.610.000	81,11
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>22.750.000</b>	<b>167.492.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>242.242.000</b>	<b>22.750.000</b>	<b>133.636.287</b>	<b>40.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>208.386.287</b>	<b>86,02</b>
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100,00
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	9.000.000	9.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000	100,00
15	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-	40.000.000	100,00
16	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	22.750.000	167.492.000	-	-	190.242.000	22.750.000	133.636.287	-	-	156.386.287	82,20
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>5.400.000</b>	<b>2.598.123.158</b>	-	-	<b>2.603.523.158</b>	<b>5.400.000</b>	<b>2.466.181.456</b>	-	-	<b>2.471.581.456</b>	<b>94,93</b>
17	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	-	1.294.560.535	-	-	1.294.560.535	-	1.195.383.750	-	-	1.195.383.750	92,34
18	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	-	778.578.673	-	-	778.578.673	-	759.905.380	-	-	759.905.380	97,60
19	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	5.400.000	14.945.000	-	-	20.345.000	5.400.000	14.839.176	-	-	20.239.176	99,48
20	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	-	442.699.450	-	-	442.699.450	-	435.158.650	-	-	435.158.650	98,30

1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+5)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
21	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		16.885.500	-	-	16.886.500	-	14.336.500	-	-	14.336.500	84,90
22	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		23.362.500	-	-	23.362.500	-	21.662.500	-	-	21.662.500	92,72
23	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran ( RKA )		27.090.500	-	-	27.090.500	-	24.895.500	-	-	24.895.500	91,90
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah</b>		<b>216.201.247</b>	-	-	<b>216.201.247</b>	-	<b>192.377.331</b>	-	-	<b>192.377.331</b>	<b>88,98</b>
24	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur		199.785.000	-	-	199.785.000	-	178.586.331	-	-	178.586.331	89,39
25	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.		16.415.247	-	-	16.416.247	-	13.791.000	-	-	13.791.000	84,01
	<b>TOTAL</b>	<b>171.330.000</b>	<b>3.388.632.683</b>	<b>59.350.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.631.332.683</b>	<b>170.500.000</b>	<b>3.183.865.517</b>	<b>59.350.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.425.715.517</b>	<b>94,34</b>

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan masih kurang/ada yang tidak layak pakai.

1. Kendiri Kendaraan roda 4 (empat) ada 4 (empat) unit dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), Esselon II.

- 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat), Esselon III, masih ada kekurangan sebanyak 2 (dua) unit karena Esselon III ada 5 (lima) orang. 1 (satu) unit untuk pengawasan dari 1 (satu) unit untuk Operasional Kantor.

2. Laptop, Komputer dan printer masih kurang

3. Mobil masih kurang sudah banyak yang tidak layak lagi.

4. Kondisi Gedung Kantor; belum adanya Toilet Umum.

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

- Belum seimbang objek pemeriksaan dengan SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.
- Rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. Solusi:

- Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Diklat Fungsional.
- Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- Mengintensifkan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan cara jemput bola dan mengaitkan kepentingan objek pemeriksaan dalam urusan naik pangkat atau pensiun ( seperti : penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat ) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia.

F. Hal-hal yang perlu dilaporkan:

- Dari keseluruhan capaian sasaran , dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan telah mengacu kepada program yang ditetapkan dalam Renstra.

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 19681017 198903 1 003	Inspektur	Eselon II b	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	V	V	V
2.	Emilaloviza, S.Sos.,M.M. NIP. 19670927 198903 2 001	Sekretaris	Eselon III a	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	V	V
3.	Sudarwin. S.P.M.Si NIP. 19681216 198803 1 001	Inspektur Pembantu Wilayah I	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
4.	Hermawan. S.T. NIP. 1780306 200501 1 003	Inspektur Pembantu Wilayah II	Eselon III a	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
5.	Irzal Aziz, S.E.,M.M. NIP. 19620928 198903 1 004	Inspektur Pembantu Wilayah III	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
6.	Afrijon, S.H. NIP. 19680212 198903 1 005	Inspektur Pembantu Wilayah VI	Eselon III a	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
7.	Rio Syandra, S.S.T., S.T. NIP. 19810707 200501 1 010	Kasubag Umum & Kepegawaian	Eselon IVa	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V
8.	Siti Wahyu Widayat, A.Md. NIP. 19700912 199303 2 001	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Eselon IVa	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
9.	Zurwin NIP. 19620614 198703 1 002	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Eselon IVa	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
10.	Nurlaili. SH.MM NIP. 19630112 198903 2 002	Pengawas Pemerintahan Madya	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
11.	Azwir Asri.SH NIP. 19630607 198903 1 011	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
12.	Yandri, S.H., M.M. NIP. 19691107 198903 2 002	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
13.	Yefrial,S.H.,M.M. NIP. 19671028 199003 1 007	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
14.	Irma Yulia ,S.Kom.M.M NIP. 19720721 198803 2 003	Auditor Kepegawaian	Fungsional Audiwan	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V



No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat FIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
15.	Medi Yuhernan, S.H. NIP. 19700201 199303 1 005	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
16.	Amrizal, S.E., M.M. NIP. 17720307 200212 1 002	Pengawas Femerintahan Muca	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
17.	Alimin NIP. 19601231 198203 1 142	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
18.	Asnidar, R, B.Ac NIP. 19601231 198611 2 003	Pengawas Femerintahan Muca	Fungsional P2UPD	-	-	V	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
19.	M. Darlis, S.Sos Nip. 19850318 201001 1 026	Pengawas Femerintahan Muca	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
20.	Eko Sutoyo, S.E NIP. 19621105 199003 1 004	Pengawas Femerintahan Muca	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
21.	Nurhayati, S.H NIP. 19670910 198903 2 003	Auditor Kepegawaian Muda	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	V
22.	Zulfa Hartati, S.E, M.M NIP. 19700401 199303 2 002	Pengawas Femerintahan Muca	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
23.	Syaftinol Martin, S.H NIP. 19621005 199301 1 002	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
24.	Syakyakirti, S.E. NIP. 19690106 198903 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V
25.	Rosiaria, S.ST, M.Si NIP. 19730216 200604 2 007	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
26.	Mamik Supriyati, S.E NIP. 19840415 200902 2 009	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
27.	Yudha Herawan, S.E. NIP. 19870711 201001 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
28.	Rivvi Reny Midona, S.T NIP. 19800126 200801 2 001	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
29.	Syafridal, S.ST NIP. 19750710 200604 1 012	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
30.	Oli Novedi Santi, S.E. NIP. 19821112 200902 2 006	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
31.	Ibrahim, S.H NIP. 19741112 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
32.	Junaidi, S.E NIP.19780103 20100 1 009	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
33.	Donis Prianto, S.H NIP.19761028 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
34.	Tri Marlisa, S.T NIP. 19850318 201001 2 026	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
35.	Desrianti, S.ST NIP. 19771228 200501 2 005	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
36.	Yeni Oktaveva Basri, S.E NIP.19821011 201101 2 015	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
37.	Andri Milda, S.E NIP.19860418 200902 2 021	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
38.	Arwen Chandra, S.E NIP. 19850423 200604 1 002	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
39.	Jefri Darma, S.H NIP. 19830204 200212 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
40.	Dian Fermana Putra, S.E Nip. 19850512 200701 1 003	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
41.	Rory Asmadia, S.E. NIP. 19810402 201407 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
42.	Rostina Yusra.S.IP NIP. 19700914 200604 2 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
43.	Fahrizal.S.IP NIP. 19760405 200604 1 016	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
44.	Syafrianto NIP. 19780426 200701 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
45.	Rio Alfino, S.Kom NIP. 19870310 201502 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
46.	Alpian NIP. 19750806 200212 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
47.	Yenni Suryati NIP. 19620227 200012 2 001	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
48.	Nova Susanti, A.Md NIP. 19761105 201101 2 003	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
49.	Endang Kos Lendra, A.Md NIP. 19820314 201212 2 001	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
50.	Megaliza.A NIP. 19840612 200701 2 003	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
	Total			-	4	4	33	10	30	20	-	3	34	13	-	1	2	16

Painan, 24 Januari 2019  
INSPEKTUR



**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
NIP. 19681017 198903 1 003

**LAMPIRAN III.1**  
**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

Inspektorat

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar Lembaga	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah Mou yang masih berlaku pada Tahun 2018	Jumlah MOU yang masih berlaku pada Tahun 2018, sebanyak 0 Mou.	0 Mou	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (.apkeu)	36	Opini BPK terhadap Lap. Keu. Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP	Opini tahun 2017 = WTP  Opini tahun 2018 = WTP	Opini : 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i> ; 2) WDP/ <i>qualified opinion</i> ; 3) TWP/ <i>disclaimer opinion</i> , atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ) Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Fengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 353 temuan . - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 343 Temuan.	97,17 %	
13	TEROBOSAN /INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Fenghargaan	42	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2018	Penghargaan yang diterima sebanyak 0 penghargaan	0 Penghargaan	



**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : Pesisir Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : Inspektorat

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	0 %	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada SOP	Jumlah SOP Perangkat Daerah sebanyak 35 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengurusan Surat Keluar 2. SOP ttg Pengurusan Surat Masuk 3. SOP ttg penyusunan DLK dan Bezzeting 4. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala 5. SOP ttg Pengajuan Cuti Pegawai 6. SOP ttg Pengajuan Surat Tugas 7. SOP ttg Pengajuan Permintaan ATK Perangkat Daerah 8. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat 9. SOP ttg Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 10. SOP ttg Penyusunan RKA dan	Ada 35 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SOP Terlampir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						DPPA 11. SOP ttg Penentrian Data Keuangan pada SIPKD 12. SOP ttg Pengajuan Permintaan GU 13. SOP ttg Penyusunan Renstra 14. SOP ttg Penyusunan LKpj dan LPPD 15. SOP ttg Penyusunan LAKIP 16. SOP ttg Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 17. SOP ttg Penyusunan Laporan Berkala Kegiatan Pengawasan 18. SOP ttg Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 19. SOP ttg Pemeriksaan Reguler 20. SOP ttg Prosedur Pemeriksaan Khusus/Kasus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 21. SOP ttg Pelaksanaan Tindak Lanjut 22. SOP ttg Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan 23. SOP ttg Penolakan Pemeriksaan oleh Auditi 24. SOP ttg Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 25. SOP ttg Penyusunan Peta Kompetensi 26. SOP ttg Reviu Periodik Anggaran		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						27. SOP ttg Ekspose Internal Temuan Pemeriksaan 28. SOP ttg SIMHP 29. SOP ttg Diklat dengan Biaya Sendiri 30. SOP ttg Rapat Rutin dan Rapat Bulanan 31. SOP ttg Pelaksanaan Pelat han Kantor Sendiri 32. SOP ttg Layanan Konsultasi 33. SOP ttg Mutasi Pejabat Fungsional Antar Irban 34. SOP ttg Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 35. SOP ttg Penerbitan SKP		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN ttg SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadai PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100 %	DUK tahun 2018 terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Nama jabatan fungsional antara lain : Auditor, P2UPD dan Audiwan.	Ada	Nama-Nama Jabatan Fungsional y ada, terlampir.
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 50 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.827 personil	0,73 %	Mengacu pada kon terakhir/update Tahun 2018

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangka: Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	44,44 %	Mengacu pada kon terakhir/update Tahun 2018	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	Mengacu pada kon terakhir/update tahun 2018	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah -DPA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangka: Daerah berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA/RPKA. 4. DPA/DPPA.	4 jenis dokumen	Sumber data Inspektorat
		10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	80 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		11	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	80 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perang Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Realisasi Belanja Inspektorat, sebesar Rp8.587.785.359,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp1.763.392.460.796,-	0,49 %	Mengacu APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Inspektorat, sebesar Rp12.000.000,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp8.846.264.447,-	1,36%	Mengacu data dari realisasi APB Tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp59.350.000,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp3.388.632.683,-	1,75 %	Mengacu data dari realisasi APB Tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp59.350.000,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp8.846.264.447,-	0,67 %	Mengacu data dari realisasi APB Tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, CaLK, LRA, LO, )	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca. 2. CaLK. 3. LRA. 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada  Ada sebanyak 5 jenis	Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK, LO, Laporan Perubahan Ekuitas) dilampirkan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat	Apabila Ada, Jenis dokumennya antara lain: 1.	Ada	Lampiran Laporan Aset Sampai dengan Tahun 2017 dan Tahun

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN			
			atau asset Perangkat Daerah	Daerah	1. KIB A s.d. F 2. Buku Inventaris 3. Belanja Modal Tahun 2018		2018			
	Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebesar Rp4.085.715.717,-	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>		Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana masyarakat	fasilitas/partisipasi	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : - Papan Pengumuman - Kotak Pengaduan - Lapor Sp4n	Jurnalnya sebanyak 3 jenis.	Papan Pengumuman informasi untuk PNS dan Kotak Pengaduan dari PNS/Masyarakat
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Surat Ketetapan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak adanya survey kepuasan masyarakat terhadap publik	Tidak Ada	Tidak Adanya Survey kepuasan tentang pelayanan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.			

24  
 Painan, Januari 2019  
 Inspektur,  
  
 Drs. YESPI MAWIARSIH  
 NIP. 196810171989031003

## RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan fungsi penunjang lainnya)

1. INSPEKTORAT
2. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KET
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	
11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	
12.	Kegiatan Penyebarluaskan Informasi Pembangunan	
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	

<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KIDH</b>	
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Perada.	
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran ( RKA )	
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah</b>	
24.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	
25.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	

3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.

NO.	URAIAN	JUMLAH													
		PNS										KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
		IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	S.2	S.1	D.III	SLTA
1	STRUKTURAL	4	3	3	4	1	4	2	1	-	-	3	12	3	4
2	FUNGSIONAL	4	2	6	4	10	2	-	-	-	-	7	20	1	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



#### 4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>569.366.273</b>	<b>553.370.443</b>	<b>97,19</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	42.900.000	35.002.648	81,59
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.200.000	90.350.000	99,07
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.205.391	57.205.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.350.000	19.350.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.655.923	31.655.900	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.041.964	40.041.900	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.738.000	9.735.000	99,97
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	4.500.000	4.320.000	96,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.290.000	39.592.500	93,62
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	161.350.000	161.212.495	99,91

11.	Rapat – rapat kcordinasi dan konsultasi dalam daerah	47.425.000	47.295.000	99,73
12.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	21.710.000	17.610.000	81,11
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>242.242.000</b>	<b>208.386.287</b>	<b>86,02</b>
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	100,00
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	190.242.000	156.386.287	82,20
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>2.603.523.158</b>	<b>2.471.581.456</b>	<b>94,93</b>
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	1.294.560.535	1.195.383.750	92,34
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	778.578.673	759.905.380	97,60
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	20.345.000	20.239.176	99,48

20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	442.699.450	435.158.650	98,30
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	16.886.500	14.335.500	84,90
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	23.362.500	21.662.500	92,72
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran ( RKA )	27.090.500	24.895.500	91,90
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa</b>	<b>216.201.247</b>	<b>192.377.331</b>	<b>88,98</b>
24.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	199.785.000	178.586.331	89,39
25.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	16.416.247	13.791.000	84,01
	<b>TOTAL</b>	<b>3.631.332.683</b>	<b>3.425.715.517</b>	<b>94,34</b>

## 5. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

*“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Ungul, Agamis dan Sejahtera”*

## Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “ *Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan reponsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat* “

### 6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCUKUPI ATAU LAINNYA) SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG ANTARA LAIN :

- **Bangunan Gedung Kantor:**  
Bangunan Gedung Kantor 2 (dua), Bangunan Tempat Ibadah 1 (satu), Bangunan Parkir 1 (satu), Pagar Gedung kantor 1 (satu).
- **Alat-Alat Angkutan:**  
Kendaraan Roda 4; 4 (empat) unit, Kendaraan Roda 2; 6 (enam) unit.
- **Alat Kantor:**  
Mesin Tik Manual 1 (satu) unit, Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit, Mesin Absensi 1 (satu) unit, Perangkat CPE 1 (satu) paket.
- **Alat Rproduksi (Penggandaan):**  
Alat Mesin Foto Kopi/Penggandaan 1 (satu) unit.
- **Alat Penyimpanan perlengkapan Kantor:**  
Lemari Besi/Metal 2 (dua) unit, Filling Besi/Metal 11 (sebelas) unit, Brangkas 1 (satu) unit.
- **Alat Kantor Lainnya:**  
UPS 13 (tiga belas) unit, Mesin Penghancur Kertas 2 (dua) unit, Meja Biro 3 (tiga) unit, Kursi Biro 1 (satu) unit, Generator Set 1 (satu) unit, Stabilizer 9 (lima) unit, Papan informasi 8 (delapan) unit, Merawa 1 (satu) paket.
- **Alat Rumah Tangga:**  
Lemari Kayu 6 (enam) unit, Rak Kayu 1 (satu) unit, Meja besi/Metal 1 (satu) unit, Meja Rapat 1 (satu) unit, Meja Resepsionis 1 (satu) unit, Kursi Rapat 6 (enam) unit, Kursi Tamu 8 (delapan) unit, Kursi Putar 8 (delapan) unit, Kursi Biasa 3 (tiga) unit, Lemari Panjang 1 (satu) unit, Kursi tunggu 6 (enam) unit, AC 11 (sebelas) unit, Kipas Angin 6 (enam) unit, Televisi 7 (tujuh) unit, Stabilisator 1 (satu) unit, Camera Video 1 (satu) unit, Gorden 2 (dua) paket, Pompa Air 1 (satu) unit
- **Komputer:**



Komputer 10 (sepuluh) unit, Lap Top 16 (enam belas) unit, I PAD 2 (dua) unit, Printer 15 (lima belas) unit, Scanner 2 (dua) unit, Hard Disk External 3 (tiga) unit, Server 1 (satu) unit.

- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat:  
Meja Kerja 16 (enam belas) unit, Kursi Kerja 6 (enam) unit, Kursi Rapat 1 (satu) paket, Lemari Arsip 7 (tujuh) unit.
- Alat Studio dan Alat Komunikasi:  
Proyektor+Attachment 1 (satu) unit, Sound System 1 (satu) unit, Handycam 1 (satu) unit, Camera Digital 5 (lima) unit, Telepon (PABX) 1 (satu) unit, Faximile 1 (satu) unit.
- Buku Perpustakaan:  
Buku Ilmu Pengetahuan Umum 160 (seratus enam puluh) buah, Buku Peraturan Perundang-undangan 261 (dua ratus enam puluh satu) buah.

Sarana dan Prasarana yang ada dilingkup Inspektorat, masih kurang memadai dan tidak layak.

## 7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### I. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
- b). Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- c). Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).
- d). Terbatas dan kurangnya sarana transportasi untuk operasional ke lapangan.
- d). Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.  
Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- e). Rendahnya kesadaran masyarakat memberikan informasi penyimpangan yang dilakukan aparat.

### Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a). Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan non-Formal dan Diklat Fungsional .
- b). Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- c). Menyardarkan obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatasi dengan cara kerja jempot bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- d). Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- e). Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

8. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN

- Perlunya tambahan sarana operasional dengan kondisi baik.
- Perlunya tambahan SDM yang berkompetensi.
- Perlunya tambahan kesejahteraan ASN.

Painan, 24 Januari 2019

Inspektur  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**Drs. YESRI NAWIARSIH**  
Pembina Tk.I.

NIP. 19681017 198903 1 003

## KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

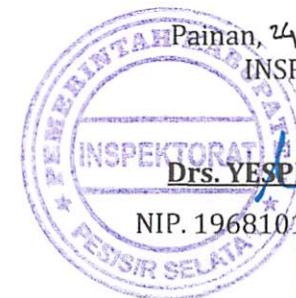
BIDANG : PENUNJANG

1. Forum Koordinasi : -
2. Materi Koordinasi : -
3. Instansi Vertikal yang terlibat : -
4. Sumber dan Jumlah Anggaran : -
5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan : -
6. Hasil dan Manfaat Koordinasi : -
7. Tindaklanjut Hasil Koordinasi : -
8. SDM Pendukung Program dan Kegiatan:
  - Jumlah Pegawai : -
  - Kualifikasi Pendidikan : -
  - Pangkat atau Golongan : -
  - Jumlah Pejabat Struktural : -

Painan, 24 Januari 2019  
INSPEKTUR

**Drs. YESPINAWIARSIH**

NIP. 19681017 198903 1 003



# KERJASAMA ANTAR DAERAH

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bidang :-

1. Daerah yang diajak kerjasama : -
2. Dasar Hukum : -
3. Bidang Kerjasama; -
4. Nama Program dan Kegiatan : -
5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Antar daerah: -
6. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan (Pegawai yang merangani kerjasama) : -
7. Sumber dan Jumlah Anggaran : -
8. Jangka Waktu kerjasama : -
9. Hasil (Output) dari Kerjasama : -
10. Permasalahan dan Solusi : -
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

Painan, 24 Januari 2019

INSPEKTUR



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003.

## KERJASAMA ANTAR DAERAH

A. SKPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

B. Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	NAMA BADAN KERJASAMA*	PARA PIHAK	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	DASAR HUKUM PELAKSANAAN	HASIL KERJASAMA	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	PEMEENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAEFAH (TKKSD)	KENDALA/MASALAH
	N		I		H		I	L	

Painan, 24 Januari 2019

INSPEKTUR



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003



# KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD FELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
<b>I.</b>	<b>Program.....</b>						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>		
<b>II.</b>	<b>Program .....</b>						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	<b>Total</b>						

- A. Mitra yang diajak Kerjasama : -
- B. Dasar Hukum : -
- C. Bidang Kerjasama : -
- D. Nama Kegiatan : -
- E. Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga : -
- F. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan : -
- G. Sumber dan jumlah anggaran : -
- H. Jangka Waktu Kerjasama : -
- I. Hasil (Output) dari Kerjasama : -
- J. Permasalahan dan Solusi : -
  - 1. Permasalahan:
    - -
  - 2. Solusi:
    - -

TUGAS PEMBANTUAN

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

i. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

BIDANG : PENUNJANG

- A. Dsar Hukum :
- B. Instansi Pemberi Tugas :
- C. Perangkat Daerah Pelaksana :
- D. Program dan Kegiatan :
- E. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
- F. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :
- G. SDM Pendukung program dan kegiatan :
- H. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan :
- I. Permasalahan dan Solusi :
- J. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan :
- K. Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
<b>I.</b>	<b>Program.....</b>						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>		
<b>II.</b>	<b>Program .....</b>						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	<b>Total</b>						

ii. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (KABUPATEN PADA KECAMATAN ATAU NAGARI)

- 1. Dasar Hukum
- 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota
- 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
- 4. SDM Pendukung
- 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, sparatisme atau lainnya) :-
2. Perangkat Kerja yang rnenangani :-
3. Jumlah Pegawai, Kualiiikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :-
4. Penanggulangan dan kendalanya :-
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan :-
6. Sumber dan Jumlah Anggaran :-

Painan, 24 Januari 2019  
Inspektur,

Drs. YESPI NAWIARSIH  
NIP. 19681017 199803 1 003



# PENYUSUNAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2018

## A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkar Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

OPD Pelaksana : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>569.366.278</b>	<b>553.370.443</b>	<b>97,19</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	42.900.000	35.002.648	81,59
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.200.000	90.350.000	99,07
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.205.391	57.205.000	99,99
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.350.000	19.350.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.655.923	31.655.900	99,99
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.041.964	40.041.900	99,99
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.738.000	9.735.000	99,97
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	4.500.000	4.320.000	96,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.290.000	39.592.500	93,62
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	161.350.000	161.212.495	99,91
11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	47.425.000	47.295.000	99,73
12.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	21.710.000	17.610.000	81,11

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>242.242.000</b>	<b>208.386.287</b>	<b>86,02</b>
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	100,00
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	190.242.000	156.386.287	82,20
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>2.603.523.158</b>	<b>2.471.581.456</b>	<b>94,93</b>
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	1.294.560.535	1.195.383.750	92,34
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	778.578.673	759.905.380	97,60
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	20.345.000	20.239.176	99,48
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	442.699.450	435.158.650	98,30
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	16.886.500	14.336.500	84,90
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23.362.500	21.662.500	92,72
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran ( RKA )	27.090.500	24.895.500	91,90
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa</b>	<b>216.201.247</b>	<b>192.377.331</b>	<b>88,98</b>
24.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	199.785.000	178.586.331	89,39
25.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	16.416.247	13.791.000	84,01
	<b>TOTAL</b>	<b>3.631.332.683</b>	<b>3.425.715.517</b>	<b>94,34</b>

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Dialokasikan dana sebesar **Rp569.366.278,00** Realisasi **Rp553.370.443,00** atau ( 97,19 %) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik:*

Menampung biaya belanja rekening bulanan telepon, air dan listrik dgn pagu anggaran sebesar Rp42.900.000,00 realisasi sebesar Rp35.002.648.00 ( 81,59 %).

2). *Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*

Menampung biaya belanja jasa administrasi keuangan untuk satu tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp91.200.000.00 realisasi sebesar Rp90.350.000,00 (99,07%)

3). *Penyediaan jasa kebersihan kantor*

Menampung belanja Jasa kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor serta pekarangan untuk satu tahun (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp57.205.391,00 dengan realisasi sebesar Rp57.205.000,00 atau (99,99%).

4). *Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja*

Menampung belanja perbaikan peralatan kerja; Laptop 10 unit, Mesin Fotokopi 1 unit, Komputer 10 unit, printer13 unit AC 10 unit dan Genset 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp19.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.350.000,00 atau (100,00%).

5). *Penyediaan alat tulis kantor*

Menampung belanja keperluan alat tulis kantor untuk 1 satu) tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp31.655.923,00 dengan realisasi sebesar Rp31.655.900,00 atau (99,99%).

6). *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.*

Menampung biaya cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama satu tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp40.041.964,00 dengan realisasi sebesar Rp40.041.900 ,00 atau (99,99 %).

7). *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*

Menampung keperluan alat-alat listrik kantor selama 1 tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp9.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.735.000,00 atau ( 99,99%).



- 8). *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan*  
Menampung kebutuhan media kantor (Langganan Surat Kabar Singgalang, Haluan dan Padang Ekspres) selama 1 tahun (12 bulan) dan buku-buku penunjang pengawasan pagu anggaran sebesar Rp4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.320.000,00 atau (96%).
- 9). *Penyediaan makanan dan minuman*  
Menampung kebutuhan makan, minum harian pegawai, rapat dan tamu kantor, pagu anggaran sebesar Rp42.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.592.500,00 atau (93,62 %).
- 10). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*  
Menampung belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dalam rangka rapat koordinasi pengawasan, rapat koordinasi teknis pengawasan, pemutakhiran data pengawasan, rapat koordinasi kepegawaian, konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, dan koordinasi pengawasan serta pelaporan ke Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, alokasi pagu anggaran sebesar Rp161.350.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp161.212.495,00 atau (99,91 %).
- 11). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah*  
Menampung belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam monitoring dan evaluasi pengawasan serta pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) ke Obrik Pemeriksaan, alokasi pagu anggaran sebesar Rp47.425.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp47.295.000,00 atau (99,73 %).
- 12). *Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan*  
Menampung belanja untuk kegiatan Pameran Festival Langkisau dan Pameran Pembangunan, alokasi pagu anggaran sebesar Rp21.710.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp17.610.000,00 atau (81,11%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dialokasikan dana sebesar Rp242.242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp208.386.287,00 atau (86,02%) dengan kegiatan sebagai berikut;

- 1). *Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*  
Menampung belanja pengadaan perlengkapan Kantor (1 unit Mesin Penghancur Kertas), alokasi pagu anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau (100,00%).
- 2). *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*  
Menampung belanja pengadaan peralatan gedung kantor (13 unit Printer), dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp9.000.000,00 (100,00% )

3). *Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, tpegecatan gedung dan pagar kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 (100,00%)

4). *Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas operasional*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional, 4 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, service, suku cadang, bahan bakar minyak dan pembayaran STNK dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.242.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp156.386.287,00 (82,20%)

### **Urusan Pilihan**

#### **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Dianggarkan dana sebesar Rp2.603.523.158,00 dengan realisasi sebesar Rp2.471.581.456,00 atau (94,93% ) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala*

Menampung belanja operasional pemeriksaan berkala/reguler berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2018 dengan penerbitan LHP sebanyak 200 berkas, pagu anggaran sebesar Rp1.294.560.535,00 dengan realisasi sebesar Rp1.195.383.750,00 atau (92,34% ).

2). *Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah*

Menampung biaya operasional pemeriksaan kasus/ khusus, dengan penerbitan LHP 101 berkas, pagu anggaran sebesar Rp778.578.673,00 dengan realisasi Rp759.905.380,00 atau (97,60%).

3). *Inventarisasi Temuan Pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan pemeliharaan Aplikasi SIM-HP dengan pagu anggaran sebesar Rp20.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.239.176,00 atau (99,48%).

4). *Tindak lanjut hasil temuan pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan objek pemeriksaan, pagu anggaran sebesar Rp358.912.950,00 dengan realisasi sebesar Rp357.728.600,00 atau (99,67%).

- 5). *Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*  
Menampung biaya operasional pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pagu anggaran sebesar Rp16.446.500,00 dgn realisasi sebesar Rp14.336.500,00 atau (84,90%).
- 6). *Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )*  
Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp23.362.500 00 dengan realisasi sebesar Rp21.662.500,00 atau (92,72%).
- 7). *Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD*  
Menampung biaya operasional pelaksanaan Evalausi RKA SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp27.090.500,00 dgn realisasi sebesar Rp24.662.500 00 atau (91,90 %).

*Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur.*

Dianggarkan dana sebesar Rp328.489.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.943.850,00 atau (76,70%) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). *Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*  
Menampung biaya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp199.785.000,00 dengan realisasi sebesar Rp178.586.331,00 atau (89,39%) .
- 2). *Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.*  
Menampung biaya pelatihan khusus aparatur pengawasan pada kantor sendiri dengan anggaran sebesar Rp16.415.247,00 dengan realisasi sebesar Rp13.791.000,00 atau (84,01%) .

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

I. Permasalahan Yang Dihadapi

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan Sarana dan Prasana penunjang kegiatan Pengawasan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (obrik). Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.794,95 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Mobilitas yang ada pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, sudah barang tentu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas, selama tahun 2018 ditemui beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:


- a). Belum seimbangnya Objek Pemeriksaan dengan SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang ada .
- b). Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.
- c). Rendahnya kesadaran Obrik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- d). Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan .
- e). Rendahnya kesadaran masyarakat memberikan informasi penyimpangan yang dilakukan aparat.

### Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a). Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan non-Formal dan Diklat Fungsional .
- b). Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- c). Menyadarkan obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas dengan cara kerja jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- d). Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- e). Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

Painan, 24 Januari 2019  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,

  
**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
Pembina Tk.I.  
NIP. 19681017 198903 1 003